



Dukungan Habib Idrus bin Hasyim Alatas untuk Memenangkan Pasangan Anies-Sandi pada Pilkada DKI Jakarta

Rachmad Al Fajar^{1*}, Kamarudin¹

¹Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok Indonesia

*Korespondensi: ralfajar86@gmail.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:
Research Article



Tanggal Terbit:
30 September, 2021



Artikel dengan akses terbuka.

Hak Cipta © 2021 dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Journal of Politics and Democracy

Lisensi: Attribution-Non Commercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)

Cantuman Sitosi:

Fajar, R. A., & Kamarudin, K. (2021). Dukungan Habib Idrus bin Hasyim Alatas untuk Memenangkan Pasangan Anies-Sandi pada Pilkada DKI Jakarta. *Journal of Politics and Democracy*, 1(1), 46–54.
<https://doi.org/10.61183/polkrasi.v1i1.4>

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk demokrasi tingkat lokal. Pilkada Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta 2017 menunjukkan petahana tak mampu mempertahankan kekuasaan. Situasi ini dipicu oleh sejumlah faktor, di antaranya keterlibatan Habib Idrus bin Hayim Alatas dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 yang ia ikuti sebagai perwakilan umat Islam dan budaya Betawi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus, prosedur pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta teknik analisis data seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan menunjukkan bahwa Habib Idrus bin Hasyim Alatas mendukung pasangan Anies-Sandi dengan menggunakan modal sosial dan kulturalnya. Habib Idrus bin Hasyim Alatas berperan sebagai legitimasi agama, fasilitator, opinion leader, dan penggerak massa.

The Regional Head Election (Pilkada) represents one of the key forms of local-level democracy. The 2017 Jakarta Special Capital Region (DKI Jakarta) election demonstrated that the incumbent was unable to retain power. This situation was influenced by several factors, including the involvement of Habib Idrus bin Hasyim Alatas, who participated in the election as a representative of the Muslim community and Betawi culture. This study employs a qualitative case study approach, utilizing interviews, observations, and documentation as data collection methods, along with data reduction, data presentation, and conclusion drawing as analytical techniques. The findings reveal that Habib Idrus bin Hasyim Alatas supported the Anies-Sandi ticket by mobilizing his social and cultural capital. He played significant roles as a religious legitimizer, facilitator, opinion

leader, and mass mobilizer.

Kata Kunci: Anies-Sandi; Habib Idrus bin Hasyim Alatas; Jakarta; Pilkada

1. Pendahuluan

Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang secara bersama-sama dikenal dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi, kabupaten, dan kota melalui pemilihan kepala daerah secara langsung dan demokratis. Pemilihan kepala daerah bersifat demokratis dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil ([Lestari, 2019](#)).

Pada Pilkada DKI 2017, politik identitas berbasis suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA) kembali ditegakkan. Berawal pada 30 September 2016, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta saat itu melakukan kunjungan bisnis ke Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu. Dalam kesempatan itu, Ahok berpidato di depan masyarakat dengan mengutip Surat Al-Maidah 51 yang mendapat tanggapan beragam dari hadirin. Mayoritas umat Islam marah karena menganggap Ahok tidak menghormati Surat Al-Maidah dalam pidatonya.

Dalam situasi seperti ini, para pemuka agama memainkan peran penting dalam menggalang massa untuk melakukan protes terhadap Ahok. Peran digambarkan sebagai elemen dinamis dari posisi (status); jika seorang individu memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka individu tersebut memenuhi suatu peran ([Soekanto, 2002](#)). Ini menyiratkan bahwa keadaan subjektif seseorang memiliki faktor dalam bagaimana dia melakukan aktivitasnya. Fungsi tersebut dalam penelitian ini dikaitkan dengan pribadi Habib Idrus bin Hasyim Alatas, yang memiliki karakteristik sosial, budaya, politik, dan agama yang mempengaruhi pilihan politiknya, yang selalu diikuti oleh masyarakat.

Penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok memaksa para habib Indonesia, khususnya di Jakarta, untuk mengambil tindakan untuk melindungi Islam ([Kusumo dan Hurriyah, 2018](#)). Habib Rizieq Shihab, ketua Front Pembela Islam (FPI), mendukung inisiatif tersebut ([Riadi dan Drajat, 2019](#)). Gerakan politik para habib di Jakarta mendapatkan momentum, karena konsentrasi masjid dan yayasan di kota seperti Majelis Nabi dan Nurul Musthofa. Pengaruh sosial habib di Jakarta memastikan bahwa posisinya sangat penting dalam kampanye politik untuk menggantikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 ([Sholikin, 2018](#)).

Indonesia menyelenggarakan pemilu serentak pada tahun 2017. Salah satu topik yang paling menarik untuk ditelaah adalah Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI Jakarta 2017 atau Pilgub), yang dimulai pada 15 Februari 2017 dan berakhir pada 19 April 2017. Pemilihan itu menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ini merupakan pemilihan gubernur Jakarta ketiga yang digelar secara langsung melalui metode voting. Hanya partai politik dengan 22 kursi atau lebih di DPRD DKI Jakarta yang berhak mengajukan calon. Partai politik dengan kursi kurang dari sepuluh hanya dapat mengajukan calon dengan kerjasama partai politik lain ([Ardipandanto, 2017](#)).

Berikut hasil pemungutan suara Pilgub DKI 2017 putaran pertama: Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni (Agus-Sylvi) mendapat 937.950 suara dengan persentase 17,02 persen, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat (Ahok-Djarot) memperoleh 2.364.577 suara dengan persentase 42,99 persen, dan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno

Akibat hasil ini, pasangan Agus-Sylvi tersingkir, sedangkan pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandi melaju ke putaran kedua.

Menurut situs pilkada2017.kpu.go.id, pasangan Anies-Sandi mendapat 3.240.332 suara (57,95 persen) dan Ahok-Djarot mendapatkan 2.351.245 suara (42,05 persen). Kemenangan Anies-Sandi signifikan di lima wilayah DKI Jakarta, yaitu: a) Jakarta Barat unggul dengan persentase 52,8 persen; b) Jakarta Pusat unggul dengan persentase 57,7 persen; c) Jakarta Selatan unggul dengan persentase 62,1 persen; c) Jakarta Timur unggul dengan persentase 61,8 persen; d) Jakarta Utara unggul dengan persentase 52,7 persen; dan e) Seribu Is. Alhasil, pasangan Anies-Sandi memenangkan pemilihan gubernur DKI 2017.

Signifikansi Habib Idrus bin Hasyim Alatas dalam Anies-kemenangan Sandi di Jagakarsa lebih signifikan dibandingkan di daerah lain; wilayah Pasar Minggu memperoleh 166.380 suara sah, dengan Anies-Sandi menang dengan 104.664 suara (62,5 persen), sedangkan duet Ahok-Djarot memperoleh 62.858 suara (37,5 persen). Wilayah lain di Jakarta Selatan juga menunjukkan hasil yang kuat untuk Anies-win, Sandi di antaranya 64,9 persen di Jagakarsa, 67,8 persen di Mampang Prapatan, 69,1 persen di Pancoran, dan 67,5 persen di Tebet (kpu.go.id).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data yang tidak terbatas pada kategori tertentu. Teknik penelitian menggunakan studi kasus yang temuannya merupakan generalisasi dari pola kasus umum yang melibatkan orang, organisasi, atau institusi ([Ramdhani, 2019](#)). Penelitian berlangsung di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara terbuka, observasi, dan dokumentasi. Metode pengumpulan data yang lebih eksploratif berguna untuk menjelaskan permasalahan penelitian. Data yang terkumpul kemudian dievaluasi melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data ini penting untuk memilah, menajamkan, dan mengkategorikan data sesuai dengan masalah penelitian.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi, yang mengkaji tidak hanya teks itu sendiri, tetapi juga konteksnya ([White dan Marsh, 2006](#)). Dengan demikian, peneliti dapat mengamati hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi saat melakukan analisis. Jenis analisis yang digunakan adalah deskriptif, dengan tujuan untuk mendeskripsikan berbagai aspek modal sosial dan kultural. Analisis hasil didasarkan pada teori modal sosial dan kultural Putnam dan Turner dan bagaimana modal sosial itu digunakan untuk mendukung pasangan Anies-Sandi dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017.

3. Hasil dan Pembahasan

Temuan penelitian tersebut memberikan gambaran tentang modal sosial dan kultural Habib Idrus bin Hasyim Alatas, yang ia manfaatkan untuk mempromosikan pasangan Anies-Sandi pada Pilgub DKI Jakarta 2017.

3.1. Modal Sosial dan Kultural Habib Idrus bin Hasyim Alatas

Ada seorang tokoh Betawi di Jakarta Selatan, khususnya di Jagakarsa, serta seorang habib terkemuka bernama Habib Idrus bin Hasyim Alatas. Habib Idrus bin Hasyim Alatas dikenal di kancah politik sebagai sosok yang memperjuangkan prinsip-prinsip Islam. Tak sepantasnya dia kemudian menjadi utusan DPP PPP Syari'ah Pusat dari tahun 2003 sampai 2008. Bahkan saat itu Habib Idrus bin Hasyim Alatas diharapkan menjadi ketua DPP PPP, tapi dia selalu

menempatkan kyai lainnya. di depan dirinya, posisi yang akhirnya diisi oleh mbah Maimoen Zubair sampai kematianya.

Habib Idrus bin Hasyim Alatas adalah salah satu tokoh PPP yang terkenal. Saat itu, PPP memiliki sikap ulama yang kuat. Dia memiliki pengaruh yang cukup besar di sejumlah kubu Muslim, termasuk Madura dan Kalimantan Selatan. Banyak muridnya tersebar di seluruh negeri. Habib kini menjadi tokoh Betawi sekaligus ulama. Habib Idrus bin Hasyim Alatas semakin menjauhkan diri dari PPP setelah partainya mengesahkan Megawati Soekarno Putri sebagai calon presiden pada pemilu 2004. Pemimpin perempuan, menurut Habib Idrus bin Hasyim Alatas dan sejumlah ulama lain yang sependapat dengannya, tidak dibenarkan menurut syariat Islam ([Alatas, 2018](#)).

Selain sebagai salah satu petinggi FPI, Habib Idrus bin Hasyim Alatas kini menjabat sebagai petinggi DPD FPI DKI Jakarta, termasuk pendukung otoritas kebangkitan rakyat, dan bahkan dapat dianggap sebagai pendamping dan penasihat politik Habib Rizieq Shihab. Dengan demikian, sikapnya saat itu tidak sejalan dengan PPP yang merupakan mitra koalisi dengan pemerintah. Tak bisa dipungkiri, perjalanan FPI tak lepas dari peran politik Habib Idrus bin Hasyim Alatas sebagai pejabat senior DPD FPI DKI Jakarta yang mendampingi Anies-Sandi dengan memberikan kuliah kepada mahasiswa di wilayah Jagakarsa. Habib Rizieq Shihab, pada bagianya, sangat menghargai Habib Idrus bin Hasyim Alatas sebagai sesepuh, politisi, dan ulama. Tak disangka, Habib Rizieq Shihab kerap berkunjung ke rumah Habib Idrus bin Hasyim Alatas untuk berdiskusi politik dan membahas taktik propaganda.

Habib Idrus bin Hasyim Alatas memiliki modal sosial dan kultural yang dimanfaatkan untuk mengkampanyekan pasangan Anies-Sandi pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Mereka mengaktifkan modal sosialnya melalui pengajian di Yayasan Pendidikan Assaadah. Anies-Sandi. Selain itu, Habib Idrus bin Hasyim Alatas meminta dukungan masyarakat PPP untuk membantu Anies Baswedan. Oleh karena itu, bantuan Habib Idrus bin Hasyim Alatas dimaksudkan untuk menggunakan modal sosialnya guna membantu pasangan Anies-Sandi memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2017.

3.2. Peran Habib Idrus bin Hasyim Alatas Mendukung Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno

Habib Idrus bin Hasyim Alatas memerankan Anies Baswedan dalam diskusi rahasia tentang komitmennya mendukung Anies-Sandi dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Habib Idrus bin Hasyim Alatas kemudian mengirimkan informasi ini ke media berita dan mempostingnya di media sosial. Habib Idrus gencar mengkampanyekan Anies-Sandi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Habib Idrus bin Hasyim Alatas juga ikut mengkampanyekan tindakan Ahok yang dianggap menyinggung Surat Al-Maidah. Anies-Sandi selalu hadir di acara-acara besar seperti *istighosah* dan tabligh akbar.

Habib Idrus bin Hasyim Alatas adalah pendukung tetap Anies-Sandi sepanjang proses pemilihan gubernur Jakarta 2017, mulai dari pencalonan, kampanye, hingga pemungutan suara. Anies-Sandi yang langsung bertarung melawan Ahok-Djarot di Pilgub kedua, meningkatkan aktivitas politik Habib Idrus bin Hasyim Alatas sebagai sumber legitimasi agama, fasilitator, opinion leader, dan penggerak massa.

Sebagai seorang ulama, Habib Idrus bin Hasyim Alatas memainkan sejumlah peran penting. Pertama, ia bertindak sebagai sumber legitimasi agama, dengan menyatakan bahwa seorang Muslim tidak boleh memilih pemimpin dari keyakinan lain, karena ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pesan Islamnya menetapkan Anies-Sandi sebagai kandidat yang

layak didukung oleh penduduk Muslim Jakarta. Kedua, peran fasilitator dilakukan dengan mengajak jejaring sosial Habib Idrus bin Hasyim Alatas untuk mendukung Anies-Sandi. Karena kedekatan Habib Idrus dengan Habib Rizieq Shihab, ormas FPI secara aklamasi memilih Anies-Sandi di Pilgub DKI Jakarta 2017. Ketiga, peran opinion leader adalah melakukan pengajian rutin di wilayah Jagakarsa, menyisipkan slogan-slogan mendukung pasangan Anies-Sandi, dan menyelenggarakan kegiatan *istighosah* akbar, mendatangkan lebih banyak orang dan menyampaikan pesan-pesan mendukung terpilihnya seorang muslim. calon gubernur, yakni Anies-Sandi. Sandi, dan berdayakan anak sebagai sosialisasi. Keempat, fungsi Habib Idrus bin Hasyim Alatas sebagai mass mover terlihat dari banyaknya jamaah yang hadir dalam pengajian dan berita tabligh, serta kehadiran Anies-Sandi pada kesempatan tersebut. Habib Idrus bin Hasyim Alatas juga mengorganisir gerakan massa untuk mengecam komentar Ahok tentang surat Al. Maidah Acara ini menunjukkan bahwa Habib Idrus memiliki modal sosial dan kultural yang diperlukan untuk menggalang rakyat.

3.3. Analisis Modal Sosial dan Kultural Habib Idrus bin Hasyim Alatas

Habib yang secara harfiah berarti kekasih adalah sebutan kehormatan yang diberikan kepada keturunan Nabi Muhammad SAW yang tinggal di Lembah Hadhramaut Yaman, Asia Tenggara, dan Pantai Swahili Afrika Timur. Lebih tepatnya, istilah "keturunan" harus merujuk pada keturunan Husein, khususnya putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra (putri Nabi Muhammad SAW) ([Alatas, 2018](#)). Dari segi signifikansi, Quraish Shihab menguraikan habib, yang didefinisikan sebagai orang yang mencintai dan dicintai. Jadi, jika 'cinta' diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sebagai muhib. Jika yang bertunangan adalah mahbub. Jika habib digunakan, itu bisa merujuk pada subjek atau objek. Oleh karena itu, habib tidak boleh bertepuk sebelah tangan, hanya ingin dicintai namun tidak mampu mencintai orang lain ([Sumandoyo, 2017](#)). Selain itu, habib berasal dari istilah habaib, yang berarti keturunan penyayang Nabi, sebagaimana dijelaskan oleh organisasi pendokumentasian keturunan Nabi, Rabithah Alawiyah ([Alatas, 2018](#)).

Para habib di Indonesia menunjukkan keterlibatan mereka dalam kegiatan politik selama pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017; situasi ini diperparah dengan desentralisasi yang menghasilkan Pilkada ([Ramadlan & Masykuri, 2018](#)). Di daerah yang basis pesantrennya besar, peran ulama cukup signifikan dalam perebutan calon kepala daerah. Pada Pilgub DKI Jakarta 2017, peringkat survei elektabilitas gubernur incumbent yang dirilis sebelum pilkada sangat tinggi. Ahok juga dinilai berhasil membangun Jakarta karena kinerjanya yang dapat mempengaruhi keputusan warga DKI Jakarta ([Sari, 2017](#)). Secara bersamaan, Ahok membuat kesalahan ejaan, sehingga sebagian warga DKI Jakarta mengklaim itu penistaan agama, dan komentar resmi dari MUI dan ulama berdampak pada elektabilitas Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta ([Kami, 2016](#)). Pernyataan Ahok menggugah para ulama, pemuka agama, dan warga Jakarta untuk mengutuk Ahok atas penistaan agama dan mengalahkan pencalonannya dalam pemilihan gubernur Jakarta.

Secara bersamaan, umat Islam di DKI Jakarta menginginkan pemimpin dari dalam komunitas Muslim, seperti yang ditunjukkan oleh demonstrasi yang dilakukan oleh umat Islam di Jakarta pada 14 Oktober 2016, 4 November 2016, 2 Desember 2016, 11 Februari 2017, 21 Februari 2017, dan 31 Maret 2017. Pada 5 Mei 2017, PKS dan Gerindra akhirnya menominasikan pasangan Anies-Sandi sebagai lawan alternatif kombinasi Agus-Silvy yang didukung Demokrat dan PAN. Dalam pemilihan gubernur, pasangan Anies-Sandi mendapat dukungan dari akademisi dan tokoh agama, terutama para habib.

Habib Idrus bin Hasyim Alatas menunjukkan dukungannya terhadap pasangan Anies-Sandi dengan ikut serta dalam Aksi Bela Islam, melakukan ceramah agama kepada masyarakat mengajak mereka untuk mendukung calon pemimpin Muslim, menasihati umat Islam untuk tidak memilih pemimpin non-Muslim, dan mengajak para ulama di FPI untuk bergabung. Habib Idrus bin Hasyim Alatas mengaku mendukung Anies-Sandi karena merindukan sosok pemimpin Muslim di Jakarta. Ia juga menyatakan tidak ada kontrak politik berupa pembagian jabatan saat Anies-Sandi memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2017 ([Abdullah, 2015](#); [Alatas, 2018](#)).

Menurut temuan penelitian, dukungan Habib Idrus bin Hasyim Alatas terhadap Anies-Sandi tampaknya didasarkan pada dua unsur dominan, yaitu aspek sosial dan kultural yang dimiliki oleh Habib Idrus bin Hasyim Alatas. Dari segi modal sosial, Habib Idrus bin Hasyim Alatas memiliki Yayasan Pendidikan *Assa'adah* yang memiliki santri-santri yang setia kepadanya. Selain itu, Habib Idrus bin Hasyim Alatas memiliki aspek kultural sebagai keturunan Nabi, yang berarti Habib Idrus bin Hasyim Alatas dipandang oleh umat Islam sebagai tokoh yang dijadikan panutan, termasuk keputusan politik yang diambilnya.

Kemenangan Anies-Sandi di Jagakarsa cukup besar, dengan Anies-Sandi memperoleh 104.664 suara (62,5 persen) melawan Ahok-62.858 Djarot suara (37,5 persen). Alhasil, keterlibatan Habib Idrus bin Hasyim Alatas berdampak signifikan. Penggambarannya sebagai Anies-Sandi meyakinkan masyarakat untuk memilihnya dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini bermanfaat, karena karakter Habib Idrus bin Hasyim Alatas sangat berperan dalam membawa kemenangan Anies Sandi. Kejayaan Anies-Sandi dikaji melalui kacamata teori kapital Pierre Bourdieu. Menurut penulis, ide ini tidak bisa dilepaskan dari masalah kekuasaan. Akibatnya, pemikiran Bourdieu bertumpu pada isu dominasi. Secara alami, dominasi menjadi perhatian utama dalam masyarakat politik sebagai sarana untuk mengaktualisasikan kekuasaan. Pada intinya, dominasi ini bergantung pada keadaan, sumber daya (modal) para pemain, dan strategi mereka.

Konseptualisasi teori modal Bourdieu terkait erat dengan gagasan dominasi lainnya. Akibatnya, pemikiran Bourdieu terhubung dengan pengertian kekuasaan lainnya, yaitu habitus dan ranah. Istilah "habitus" mengacu pada kerangka mental kognitif yang menghubungkan orang dengan lingkungan sosialnya. Manusia diyakini diberkahi dengan kumpulan skema yang terinternalisasi yang digunakan untuk menghasilkan persepsi, pemahaman, penilaian, dan evaluasi, serta kapasitas untuk mengevaluasi lingkungan sosial. Putnam ([1993](#)) mendefinisikan modal sosial sebagai kepentingan yang ditempatkan pada rasa saling percaya antara anggota masyarakat dan pemimpin masyarakat. Modal sosial digambarkan sebagai institusi sosial yang terdiri dari jaringan, norma, dan kepercayaan sosial yang menumbuhkan kolaborasi sosial (koordinasi dan kerjasama) untuk keuntungan yang lebih besar. Hal ini juga menunjukkan perlunya jejaring sosial (network of civic participation) atau ikatan/jaringan sosial yang ada di masyarakat, serta standar yang mendorong produksi komunal. Selain itu, Putnam percaya bahwa tidak hanya konsekuensi (pendapat) yang diinginkan tetapi juga hasil yang tidak diinginkan yang diantisipasi (hasil yang tidak diharapkan).

Menurut Putnam ([1993](#)), modal sosial ditransformasikan dari sesuatu yang diperoleh individu menjadi sesuatu yang dimiliki (atau tidak dimiliki oleh individu atau kelompok orang lain di wilayah, kota kecil, kota besar, bangsa, atau benua). Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai sumber daya di mana orang dan organisasi harus berkomitmen. Komitmen didefinisikan sebagai seperangkat standar sosial yang terdiri dari modal sosial, seperti kejujuran, kesediaan untuk mempertahankan komitmen, pemenuhan tanggung jawab, dan hubungan timbal balik. Norma sosial ini adalah hukum tidak tertulis yang mengatur

bagaimana individu berperilaku dalam interaksinya dengan orang lain dalam suatu sistem sosial. Penerapan teori ini menunjukkan bagaimana menyelidiki, memahami, dan mengevaluasi pola kepercayaan, norma, dan jaringan saat ini, dinamika yang membentuknya, dan sumber yang memengaruhinya, serta bagaimana fitur tersebut diterapkan dalam kaitannya dengan lingkungan sosial yang sudah ada.

Turner (1984) mendefinisikan modal kultural sebagai "kepercayaan, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat." Dalam hal ini, dapat digambarkan sebagai habitus, yang merupakan produk dari hasil masa lalu masyarakat. Keadaan ini ada dalam ranah budaya, lebih tepatnya di wilayah interaksi antara agen dan struktur yang dipengaruhi oleh simbol-simbol budaya. Karena memanifestasikan dirinya dalam bentuk pengetahuan, kode internal, atau akuisisi kognitif yang memungkinkan aktor sosial berfungsi lebih efektif (manusia). Di antara penanda budaya tersebut adalah kharisma individu, keturunan Nabi, kesederhanaan atau zuhudan, ketakwaan, dan keyakinan dalam konsep barakah (Muazaroh & Subaidi, 2019).

Menurut teori modal sosial, Habib Idrus bin Hasyim Alatas ahli dalam mengelola modal sosialnya, terlihat dari kemampuannya memberikan pasangan Anies-Sandi kursi di Pilgub DKI Jakarta 2017. Habib Idrus bin Hasyim Alatas tidak hanya menggunakan modal sosial, ia juga memanfaatkan modal kultural berupa keyakinan terhadap nilai-nilai yang berkaitan dengan segala sesuatu yang dipandang benar dan senantiasa diikuti dengan upaya untuk mewujudkannya. Modal kultural tidak selalu terwujud dengan cara yang menguntungkan individu yang meyakininya dan/atau masyarakat. Keyakinan menjadi perilaku yang sebenarnya, menurut tesis Fishbein, melalui urutan keyakinan, sikap, niat, dan tindakan. Ini juga tidak linier, karena banyak faktor lain yang mempengaruhi perkembangan sikap, dan karenanya mempengaruhi niat dan tindakan. Modal kultural adalah jumlah total kualitas intelektual yang diperoleh melalui pendidikan formal atau warisan keluarga, seperti kapasitas untuk menunjukkan diri di depan umum, kepemilikan artefak budaya yang berharga, pengetahuan dan kemampuan khusus yang diperoleh melalui pendidikan formal, dan sertifikasi (termasuk gelar sarjana). Dengan demikian, modal kultural adalah ukuran keterampilan intelektual individu di bidang-bidang seperti logika, etika, dan estetika. Dalam bahasa lain, ini disebut sebagai modal pengetahuan yang dilegitimasi.

Kondisi ini menyiratkan bahwa organisasi yang mendukung Anies-Sandi dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 itu menjalankan rencana politik yang sangat baik. Studi Ulfa (2018) menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan tim Anies-Sandi sebanding dengan taktik pemasaran, khususnya pemasaran politik yang menggunakan bauran pemasaran. Berbagai bidang perdebatan dalam publikasi ini menunjukkan empat indikasi kunci dari strategi bauran politik: produk, harga, promosi, dan lokasi. Dalam pemasaran, keempat taktik ini sering disebut sebagai pendekatan campuran 4P. Selain itu, banyak aspek dari empat indikator campuran yang diubah menjadi aksi politik pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Barang politik, politik harga, pemasaran politik, dan penempatan politik adalah taktik Anis-politik Sandi. Keempat faktor tersebut saling terkait dan dinilai membantu Anies-Sandi memenangkan pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017.

Akibatnya, jelas bahwa kyai atau ulama berperan penting atau signifikan dalam menggalang masyarakat untuk mendukung partai politik atau pasangan calon tertentu dalam pemilu (Zuhro, 2019). Selain itu, seorang kiai atau kyai yang menjalankan sebuah pondok pesantren ternama di Kabupaten Demak atau yang pengaruhnya masih terbatas di wilayahnya masing-masing akan berperan penting dalam memobilisasi massa, yang secara tidak langsung akan berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kemaslahatan.

menggunakan hak suara seseorang. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya di lokus lain, juga menunjukkan kesejajaran cara ulama mendukung calon kepala daerah, seperti Rahmat (2017) yang melakukan penelitian tentang kemenangan Sofyan Caleg Dapil I di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis pada tahun 2014. Ia menyatakan bahwa peran ulama sangat terbatas pada pondok pesantren itu sendiri yaitu mempengaruhi guru, santri, dan alumni, karena dikhawatirkan jika ulama terjun ke dunia politik di luar pondok pesantren dan menjadi juru kampanye salah satu calon bagi partai politik atau tim sukses pasangan calon, akan menyebabkan mereka terpecah. Dunia politik akan berpengaruh pada lembaga pendidikan di pondok pesantren dan prinsip keislamannya.

Lebih lanjut, Rahmat (2017) mencatat bahwa tugas ulama dilakukan secara tidak langsung melalui pengajian dan jam'iya-jam'iyah di masyarakat. Kedekatan ulama dengan masyarakat melalui pengajian dan pengajian melalui jamiah-jamiah di masyarakat memberikan peran tidak langsung bagi ulama untuk mengajak masyarakat memilih Sofyan; dengan memberikan pengajian kepada umat ulama, ulama dapat mempengaruhi masyarakat untuk memilih pemimpin yang jujur dan amanah serta disukai oleh para ulama. Selain itu, Sofyan merupakan warga asli masyarakat Bantan, sehingga memudahkan akademisi untuk membujuk masyarakat agar memilih Sofyan.

4. Simpulan

Kemenangan Anies-Sandi di Pilgub DKI Jakarta 2017 di lingkungan Jagakarsa Jakarta Selatan difasilitasi oleh Habib Idrus bin Hasyim Alatas, yang memiliki modal sosial dan kultural yang diperlukan untuk mengamankan suara Anies-Sandi di Pilgub 2017. Selain itu, Habib Idrus bin Hasyim Alatas berperan sebagai legitimator agama, fasilitator, opinion leader, dan penggerak massa. Dia memainkan fungsi yang sangat efektif dan efisien, karena dia memiliki modal sosial dan budaya yang membuatnya memenuhi syarat untuk mengatur rakyat.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

6. Pernyataan *Conflicting Interests*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini

References

- Abdullah, E. (2018). *Habib Idrus: Kebijakan Ahok Soal Penyembelihan Hewan Kurban Matikan Syiar Islam*. [online]. Diakses 19 Februari 2021 dari <http://www.teropongsenayan.com/16769-habib-idrus-kebijakan-ahok-soal-penyembelihan-hewan-kurban-matikan-syiar-islam>
- Alatas, A. (2018). *Mungkinkah FPI Bernasib seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir?*. [online]. Diakses 18 Februari 2021 dari <https://www.gelora.co/2018/11/mungkinkah-fpi-bernasib-seperti.html>
- Alatas, A.F. (2018). *Habaib in Southeast Asia, The Encyclopaedia of Islam Three*. Leiden: Brill.

- Ardipandanto, A. (2019). Pemilihan Gubernur Dki Jakarta 2017: Strategi Politik Kandidat (The Election of Governor of Dki Jakarta 2017: Candidate Politics Strategy). *Kajian*, 22(1), 15-31.
- Kusumo, R., & Hurriyah, H. (2018). Populisme Islam di Indonesia: Studi Kasus Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI Tahun 2016-2017. *Jurnal Politik*, 4(1), 87-114.
- Lestari, D. (2019). Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas di Indonesia. JUPE: *Jurnal Pendidikan Mandala*, 4(4), 12-16.
- Muazaroh, S., & Subaidi, S. (2019). Cultural Capital dan Kharisma Kiai dalam Wacana Partai Politik. *SANGKéP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 2(2), 185-196.
- Putnam, R. (1993). The prosperous community: Social capital and public life. *The american prospect*, 13(Spring), Vol. 4.
- Rahmat, B. (2017). Elite Penentu Dalam Politik Lokal (Studi Kasus Peran Ulama Terhadap Pemenangan Sofyan Caleg Dapil I Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014). *JOM FISIP*, 4(2), hlm. 1-12.
- Ramadlan, F. S., & Masykuri, R. (2018). Marketing Isu Agama Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2015-2018. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 249-265.
- Ramdhani, H. (2019). Realitas Elit Politik Lokal dan Persepsi Masyarakat dalam Proses Pemekaran Daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 7(2), 219-226.
- Riadi, B., & Drajat, D. (2019). Analisis Framing Gerakan Sosial: Studi Pada Gerakan Aksi Bela Islam 212. *Holistik*, 3(1), 10-18.
- Sari, N. (2017). *Elektabilitas Cagub-Cawagub DKI Menurut Survei 5 Lembaga*. [online]. Diakses 18 Februari 2021 dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/04/16/09014961/elektabilitas.cagub-cawagub.dki.menurut.survei.5.lembaga?page=all>.
- Sholikin, A. (2018). Gerakan Politik Islam di Indonesia Pasca Aksi Bela Islam Jilid I, II dan III. *Madani*, 10(1), 12-33.
- Soekanto.2002. *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Sumandoyo, A. (2017). *Kita Harus Bisa Memilih antara Sayid dan Habib*. [online]. Diakses 19 Februari 2021 dari <https://tirto.id/kita-harus-bisa-memilih-antara-sayid-dan-habib-chc8>
- Turner, B. S. (1984). *Sosiologi Islam, Suatu Telaah Analitis atas Tesa Sosiologi Weber*. Jakarta: Rajawali.
- Ulfa, A. (2018). Kemenangan Anies-Sandi pada Putaran Kedua Pilkada Dki 2017-2022; Tinjauan Bauran Pemasaran Politik. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(1), 13-19.
- White, M. D., & Marsh, E. E. (2006). Content analysis: A flexible methodology. *Library trends*, 55(1), 22-45.

Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 69-81.

Tentang Penulis

Rachmad al Fajar menyelesaikan S1 Ilmu Komputer di Univ Gunadarma Depok pada tahun 2007, saat ini penulis sedang melanjutkan studi S-2 di Pasca Sarjana Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia. Penulis saat ini berkerja sebagai PNS di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.